



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 188.54/Kep.110-Hukham/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
188.54/Kep.25-Hukham/2025 TENTANG PROGRAM PERENCANAAN
PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat untuk tahun 2025, telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025;
- b. bahwa untuk mengakomodasikan kebutuhan regulasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Peraturan Gubernur Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan atas program perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2800A6FAE3>

2800A6FAE3

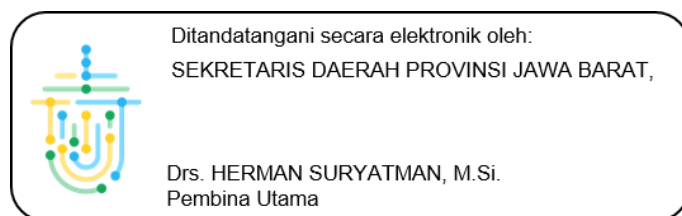
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 188.54/KEP.25-HUKHAM/2025 TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Februari 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 188.54/Kep.110-Hukham/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
BARAT NOMOR 188.54/Kep.25-Hukham/2025 TENTANG
PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025

PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
1.	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat
2.	Pengangkatan Anak	
3.	Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	
4.	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Provinsi Jawa Barat	
5.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6.	Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) dan Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (<i>Medical Staff By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Paru	
7.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat	
8.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat	
9.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut Provinsi Jawa Barat	



2800A6FAE3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2800A6FAE3>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa	
10.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat		
11.	Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
12.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
13.	Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		
14.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
15.	Peta Jalan dan Rencana Aksi Daerah Upaya Kesehatan Penglihatan Provinsi Jawa Barat		
16.	Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur		Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
17.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
18.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usialanjut Usia		
19.	Pedoman Penyusunan Rencana Pelayanan Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan		
20.	Penyelenggaraan Kemitraan Kepemudaan		
21.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa		
22.	Instrumen Evaluasi Kapasitas Pemerintahan Daerah		
23.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Koordinasi Kerja sama Daerah		



2800A6FAE3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2800A6FAE3>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
24.	Tata Kelola Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jawa Barat	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
25.	Peraturan Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
26.	Tata Cara Usulan, Penilaian, Penetapan, dan Pencabutan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
27.	Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah	
28.	Pedoman Kerja Sama dan Pembentukan Unit Usaha pada Badan Layanan Umum Daerah	
29.	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat	
30.	Pengarusutamaan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
31.	Pusat Kesejahteraan Sosial/Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah Provinsi Jawa Barat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
32.	Pengelolaan Barang Persediaan untuk Penanganan Sosial	
33.	Rencana Aksi Daerah untuk Penyandang Disabilitas	
34.	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2045	
35.	Rencana Aksi Daerah Kelanjutusiaan Provinsi Jawa Barat	
36.	Badan Pengelolaan Cekungan Bandung	
37.	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
38.	Rencana Induk Pembangunan Pergaraman Daerah	
39.	Penyelenggaraan Penanganan Infrastruktur dan Peningkatan Sosial Ekonomi di Kawasan Permukiman Kumuh	



2800A6FAE3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2800A6FAE3>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
40.	Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jawa Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
41.	Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
42.	Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	
43.	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
44.	Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah di Provinsi Jawa Barat	
45.	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
46.	Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat	
47.	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
48.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Barat	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
49.	Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
50.	Subsidi Bunga Kredit dan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Kecil di Daerah Provinsi Jawa Barat	
51.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Swadaya Perkebunan, Penyuluh Swasta Perkebunan, Fasilitator Daerah Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan, dan Tenaga Kerja Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
52.	Pengembangan Usaha Kopi Tahun 2023-2027	
53.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	
54.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	



2800A6FAE3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2800A6FAE3>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
55.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	
56.	Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau bagi Petani Tembakau Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	
57.	Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	
58.	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
59.	Tata Cara Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah	
60.	Pengembangan Buah-buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif di Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
61.	Fasilitasi Asuransi Pertanian	
62.	Pembenihan Kentang Berkualitas di Jawa Barat	
63.	Kemitraan Pengelolaan Lahan antara Pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan Petani Penggarap	
64.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	
65.	Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
66.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik Daerah	
67.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija	
68.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija	



2800A6FAE3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2800A6FAE3>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
69.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija	
70.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	
71.	Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	
72.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	
73.	Masyarakat Hukum Adat	
Asisten Administrasi Umum		
74.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	
75.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	
76.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	
77.	Transformasi Digital	
78.	Pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
79.	Penggunaan, Pemeliharaan, dan Penyusutan Arsip Dinamis	
80.	Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
81.	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	



2800A6FAE3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2800A6FAE3>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
82.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	
83.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
84.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
85.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
86.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
87.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
88.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
89.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
90.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
91.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
92.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	



2800A6FAE3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2800A6FAE3>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
93.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
94.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
95.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
96.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
97.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
98.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
99.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
100.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
101.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
102.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	



2800A6FAE3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2800A6FAE3>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
103.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
104.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
105.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
106.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
107.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
108.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
109.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
110.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
111.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
112.	Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030	
113.	Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
114.	Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
115.	Tata Hubungan kerja/ Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
116.	Hari Kerja dan Jam Kerja	
117.	Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
118.	Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 55 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
119.	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	
120.	Perubahan Formulasi Bobot Penilaian Kinerja Jabatan Guru pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara	
121.	Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi pada Jawa Barat <i>Corporate University</i>	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
122.	Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
123.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
124.	Penilaian Barang Milik Daerah	
125.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
126.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	
127.	Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	



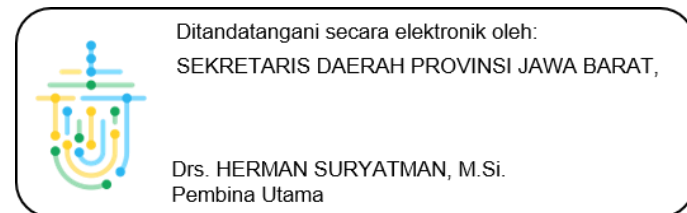
2800A6FAE3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2800A6FAE3>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
128.	Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	
129.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 110 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	
130.	Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
131.	Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
132.	Tata Cara Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
133.	Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



2800A6FAE3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2800A6FAE3>